



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode Semiotika Peirce dengan judul “Representasi Ironi Kondisi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru Dalam Lirik Lagu Manusia Setengah Dewa Karya Iwan Fals”. Berangkat dari penelitian terdahulu, peneliti menggunakan tiga jenis penelitian milik Semiotika Pierce dan Rolland Barthes yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Tiga penelitian tersebut meliputi “Studi Semiotika Lirik Lagu Iwan Fals” karya A. Tjahjo Sasongko tahun 1990, mahasiswa dari Universitas Indonesia yang mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, “Representasi Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Lirik Lagu Grup Band Dewa 19” yang dibuat oleh Friska Melani tahun 2008, mahasiswi dengan Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana dari Universitas Indonesia, dan “Representasi Kehidupan Politik di Indonesia Dalam Lirik Lagu Iwan Fals” yang dibuat oleh Nurtryasa Goktuana Gultom tahun 2013, mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Dalam penelitian terdahulu pertama yang membahas mengenai studi semiotika lirik lagu karya Iwan Fals, Tjahjo menggunakan pendekatan penelitian dengan sifat kualitatif deskriptif. Maka, dalam penelitian yang menggunakan metode Charles S. Peirce, digunakan untuk mengetahui makna yang terdapat dalam lirik lagu

Iwan Fals. Tujuan penelitian yang dikatakan Tjahjo ada dua, yakni mengetahui bagaimana situasi global masyarakat pada saat pesan dalam lagu itu tercipta dan mengetahui kondisi yang melatarbelakangi si komunikator dalam memandang realita dan mengekspresikannya dalam bentuk lirik lagu sebagai sistem tanda. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa Iwan Fals dalam membawakan dua buah lagu, seperti Celoteh Camar Tolol dan Cemar dalam kurun waktu tujuh tahun (1981-1988) lebih banyak menggunakan tanda yang mengandung fungsi *emotive* dalam lirik lagunya, daripada mengandung referential *function*. Di samping itu, lirik lagu Iwan Fals hanya menggambarkan sebagian besar fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat agar segera diketahui oleh masyarakat, tidak melakukan suatu bentuk penyelesaian masalah. Namun, masyarakat menjadi sadar bahwa ada bentuk ketimpangan sosial yang terjadi sehingga lagu-lagu tersebut dapat dijadikan penyalur rasa tidak puas terkait penyimpangan sosial yang terjadi. Namun, pada akhirnya Iwan Fals hanya dianggap sebagai penyanyi yang melakukan kompromi dengan produser dan keluarganya dan ia bukanlah seorang pahlawan yang memperjuangkan tatanan masyarakat.

Sedangkan dalam penelitian terdahulu kedua yang diteliti oleh Friska Melani, pendekatan penelitian yang dilakukan Friska berdasarkan pada metode analisis teks semiotika Roland Barthes yang bersifat kualitatif-interpretatif. Friska hanya mengambil 37 lagu yang berhubungan dengan perempuan dari 86 lirik lagu yang ada. Kemudian, dari 37 lirik lagu yang dipilih, Friska menetapkan 17 lagu dengan

menggunakan sampel purposif. Penggunaan semiotika Barthes dapat diungkap melalui makna, simbol, nilai, ideologi yang tercermin dalam teks melalui pengamatan naratif, struktur, gaya bahasa, dan sudut pandang. Dalam kesimpulannya, Friska meneliti tentang lirik lagu grup band Dewa 19 dengan tujuan untuk melihat relasi laki-laki dan perempuan dalam lirik lagu dan melihat bagaimana stereotip laki-laki dan perempuan direpresentasikan serta isu-isu perempuan apa saja yang direpresentasikan dalam lirik lagu grup band Dewa 19. Secara menyeluruh, grup band Dewa 19 ini mengkonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam lirik lagu, Friska ingin menanamkan ideologi terjadi ketimpangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang dikaitkan dengan mitos-mitos di mana lirik lagu Dewa 19 masih memperlihatkan stereotip tentang laki-laki dan perempuan.

Terakhir, penelitian terdahulu ketiga yang diteliti oleh Nurtryasa Goktuana Gultom menggunakan metode Roland Barthes. Dalam penelitian Goktuana, dikatakan bahwa tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui representasi kehidupan politik pada teks lagu Manusia Setengah Dewa dan Surat Untuk Wakil Rakyat. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis penanda dan petanda yang terdapat dalam lirik lagu Surat Untuk Wakil Rakyat dan Manusia Setengah Dewa. Pada akhirnya, analisis yang dilakukan dapat berupa makna denotasi dan konotasi yang dapat merepresentasikan kehidupan politik di Indonesia. Namun, Nurtryasa selaku peneliti lebih berfokus pada sudut pandang bahwa lirik lagu Manusia Setengah Dewa ini mengacu pada harapan rakyat akan adanya pemerintah yang nantinya

diangkat menjadi Manusia Setengah Dewa. Selain itu, konsep yang digunakan Nurtryasa juga sebagian berasal dari KBBI Online sehingga hasil penelitiannya kurang mendalam. Dapat disimpulkan bahwa lirik lagu Manusia Setengah Dewa merepresentasikan tentang presiden baru yang terpilih pada 2004 karena lagu ini dirilis sebelum dilakukan pemilihan langsung terhadap presiden. Sedangkan, di dalam lagu Surat Untuk Wakil Rakyat merepresentasikan tentang lembaga politik yang dikuasai oleh DPR yang dirilis sebelum melakukan pemilihan umum terhadap DPR dan DPRD pada 23 April 1987. Dalam penelitian terdahulu ini, Nurtryasa juga mengatakan bahwa kedua lirik lagu Iwan Fals yang ditelitinya masih dapat digunakan untuk merepresentasikan kehidupan politik yang terjadi saat ini karena hal-hal yang dikritik pada 1987 dan 2004 masih berlaku hingga sekarang.

2.2 Representasi

Representasi merupakan kegunaan dari tanda (Wibowo, 2011: 122). Representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses statis tapi merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemampuan intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus bergerak dan berubah. Representasi merupakan suatu bentuk usaha konstruksi. Karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia (Wibowo, 2011: 124).

Istilah representasi itu sendiri menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2001: 113).

Sedangkan, Stuart Hall (1997: 17) mengemukakan bahwa representasi adalah produksi makna akan konsep-konsep di pikiran kita melalui bahasa.

Dalam memahami definisi representasi, Wibowo (2011: 124) juga menyebutkan representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep representasi sendiri bisa berubah-ubah. Selalu ada pemaknaan baru.

Menurut Nuraini Julianti dalam Wibowo (2011: 124) dijelaskan representasi berubah-ubah akibat makna yang juga berubah-ubah. Setiap waktu terjadi proses negosiasi dalam pemaknaan.

Menurut David Croteau dan William Hoynes dalam Wibowo (2013: 149), bahwa representasi merupakan hasil dari suatu proses penyeleksian yang mengarisbawahi hal-hal tertentu dan hal lain diabaikan.

2.3 Semiotika dan Komunikasi

Zoest (1991: 1-2) menyebutkan semiotika modern mempunyai dua orang bapak, yang satu Charles Sanders Peirce (1839-1914), yang lain Ferdinand de Saussure (1857-1913). Menurut Peirce, logika harus mempelajari bagaimana orang

bernalar. Penalaran itu, menurut hipotesis teori Peirce yang mendasar, dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Sebaliknya, Saussure mengembangkan dasar-dasar teori linguistik umum. Kekhasan teorinya terletak pada kenyataan bahwa ia menganggap bahasa sebagai sistem tanda.

Zoest (1991: 57) menyebutkan bahwa menurut pandangan de Saussure, *langue* merupakan suatu fakta sosial, seperti halnya bahasa nasional merupakan fakta sosial. Jadi, *langue* adalah suatu sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat pemakai bahasa tersebut, seolah-olah kode-kode tersebut telah disepakati bersama di masa lalu di antara pemakai bahasa. Adapun *parole* adalah penggunaan bahasa secara individual. Secara implisit dapat ditangkap bahwa *langue* dan *parole* berposisi, tetapi sekaligus juga saling tergantung.

Bierwisch dalam Zoest (1991: 57) juga mengungkapkan bahwa *langue* sebagai gudang tanda dari semua ungkapan *parole* tidaklah merupakan “kumpulan dari ungkapan-ungkapan secara kebetulan, melainkan terdiri atas sebuah sistem dari unsur-unsur dan hubungan-hubungan yang mendasari sistem tersebut”.

Kancah penelitian semiotika tak bisa begitu saja melepaskan nama Roland Barthes (1915-1980) ahli semiotika yang mengembangkan kajian yang sebelumnya punya warna kental strukturalisme kepada semiotika teks. Barthes melontarkan konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai kunci dari analisisnya. Dengan begitu,

primary sign adalah *denotative* sedangkan *secondary sign* adalah satu dari *connotative semiotics*. Konsep *connotative* inilah yang menjadi kunci penting dari model semiotika Roland Barthes. Pada signifikansi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos (*myth*) (Wibowo, 2011: 16-17).

Sedangkan, menurut Umberto Eco dalam Wibowo (2013: 24-25) mengatakan bahwa pada prinsipnya (semiotika) adalah sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta. Semiotika menaruh perhatian pada apapun yang dapat dinyatakan sebagai tanda. Sebuah tanda adalah semua hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Dengan demikian, semiotika pada prinsipnya adalah suatu disiplin yang mempelajari apa pun yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kebohongan.

Semiotika secara singkat bisa diartikan sebagai ilmu tentang tanda. Dalam bahasa Yunani *Semeiotikos* artinya penafsir tanda, sebagai suatu disiplin ilmu. Semiotika berarti ilmu analisa tentang tanda atau studi tentang sistem penandaan berfungsi (Wibowo, 2011: 134).

Berger (2010: 3) mengemukakan unit dasar dari ilmu semiotika ialah *sign*, yaitu tanda, yang definisi konseptualnya ialah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, "*something that stands for something else*".

Tinarbuko (2009: 16) mengemukakan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Ia mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan.

Semiotika dan komunikasi saling berhubungan satu sama lain. Littlejohn dalam Suprpto (1990: 98) mendefinisikan tanda adalah basis dari seluruh kegiatan komunikasi. Manusia dengan perantaraan tanda-tanda dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Banyak hal yang bisa dikomunikasikan di dunia ini. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda, yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode (sistem tanda), pesan saluran komunikasi, dan acuan hal yang dibicarakan.

Dalam konteks komunikasi, komunikasi dapat diartikan sebagai pertukaran pesan atau informasi yang dilakukan lebih dari dua orang atau lebih sehingga menimbulkan timbal balik dalam berinteraksi.

Onong Uchmaya dalam Bungin (2006: 31) mengatakan komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran, atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan).

Stephen Littlejohn dalam Morissan (2013: 8) mengatakan *communication is difficult to define. The word is abstract and, like most terms, posses numerous*

meanings (komunikasi sulit untuk didefinisikan. Kata “komunikasi” bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah, memiliki banyak arti).

Collin Cherry dalam Saefullah (2013:3) mengatakan dari perspektif sosiologi, komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa dan tanda.

Menurut Mufid (2005: 3), definisi komunikasi pada dasarnya dapat ditarik ‘benang merah’ sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan proses di mana individu – dalam hubungannya dengan orang lain, kelompok, organisasi atau masyarakat – merespons dan menciptakan pesan untuk berhubungan dengan lingkungan dan orang lain
2. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, biasanya melalui sistem simbol yang berlaku umum, dengan kualitas bervariasi
3. Komunikasi terjadi melalui banyak bentuk, mulai dari dua orang yang bercakap secara berhadapan-hadapan, isyarat tangan, hingga pada pesan yang dikirim secara global ke seluruh dunia melalui jaringan telekomunikasi
4. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan kita berinteraksi (bergaul) dengan orang lain. Tanpa komunikasi kita tidak akan mungkin berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan orang lain. Proses berkomunikasi dalam hal ini bisa melalui ucapan (*speaking*), tulisan (*writing*), gerak tubuh (*gesture*) dan penyiaran (*broadcasting*).

2.4 Musik Sebagai Fungsi Komunikasi

Menurut Alan P. Merriam dalam Nasution (2007: 52) mengemukakan bahwa fungsi musik sebagai alat komunikasi adalah fungsi musik yang mungkin kurang diketahui dan dimengerti orang, sebab musik bukanlah bahasa universal yang dapat dipahami oleh siapa saja dan di mana saja karena setiap jenis musik lahir dan tumbuh berkembang pada suatu masyarakat tertentu dengan kebudayaannya.

Diakui bahwa musik dapat menjadi perantara untuk menyampaikan perasaan selain mengkomunikasikan dan membangkitkan serangkaian emosi. Kekuatan musik dapat dirasakan mulai dari kemampuannya untuk menyebabkan orang merasa tidak nyaman (misal dari musik hingar bingar yang terdengar bercampur aduk), sampai menjadi sarana untuk menyentuh emosi paling lembut yang bisa dirasakan seseorang (Djohan, 2009: 114).

Selain musik sebagai sarana komunikasi yang turut menyampaikan pesan kepada para pendengar musik, musik juga berperan untuk menghibur masyarakat. Musik merupakan hasil karya cipta para seniman yang dapat memberikan hiburan kepada masyarakat (Sulastianto, 2007: 34).

Menurut Alan P. Merriam dan Soedarsono dalam Sulastianto (2007: 34) menyebutkan bahwa seni musik mempunyai delapan fungsi penting, yaitu sebagai berikut:

1. suatu kenikmatan estetis, yaitu sesuatu yang bisa dinikmati oleh pencipta dan penontonnya
2. hiburan bagi warga masyarakat yang menyukai musik
3. alat komunikasi bagi masyarakat yang mengerti musik. Artinya, jenis musik yang disajikan dan dimengerti oleh sekelompok masyarakat tertentu belum tentu dimengerti oleh kelompok masyarakat yang lain. Dengan demikian, musik sebagai bahasa yang dikenal, dipahami, dan dipelajari dengan cara banyak melihat, mendengar, dan menganalisis karya musik tersebut
4. simbolisasi, yaitu musik melambangkan suatu kejadian atau peristiwa
5. respons fisik, yaitu musik berfungsi sebagai sebuah iringan tari tradisional
6. hal yang bisa memperkuat norma-norma sosial
7. pengesahan institusi-institusi sosial dan acara-acara keagamaan
8. sumbangan pada pelestarian dan stabilitas kebudayaan

Jatmika (2009: 56) mengatakan bahwa musik juga bisa menjadi kritik sosial (Lagu Umar Bakri; Wakil Rakyat, Seperti DPR, dll). Musik juga bisa menjadi penanda terjadinya suatu peristiwa/fenomena sosial (Lagu Mbah Maridjan, SMS, Lelaki Cadangan, dll).

Dapat disimpulkan, musik sebagai kritik sosial berarti musik dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan masalah-masalah sosial politik yang terkait dengan fenomena sosial politik yang terjadi pada saat itu di suatu negara.

Iwan Fals adalah salah satu contoh musisi yang gemar berekspresi mengenai lirik lagunya yang terkesan mengkritik. Tak heran, kebanyakan lirik lagu yang dibawakan oleh penyanyi legendaris ini menuai banyak kontroversi atas kritiknya terhadap fenomena sosial politik yang terjadi di negara Indonesia.

Jika penyanyi umumnya mengenai cinta atau mengenai anggur dan rembulan, maka Iwan Fals berekspresi mengenai kritik sosial (Ali, 2006: 108).

2.5 Ironi Kondisi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru

Kondisi politik di Indonesia pasca orde baru masih memunculkan suatu ironi hingga saat ini.

Lefebure (2006: 120) mengatakan dalam arti tertentu, ironi adalah kombinasi keadaan yang bertentangan dengan apa yang diharapkan.

Sistem politik baik pada masa Orde Baru maupun pada masa reformasi tidak banyak mengalami perubahan. Sistem politik di kedua periode ini sama-sama kurang mempunyai kapabilitas sistem politik yang seharusnya mereka miliki (Winarno, 2007: 127).

Arbi Sanit dalam Winarno (2007: 128) mengemukakan bahwa reformasi yang berlangsung masih berkenaan dengan perubahan secara umum dari kehidupan sistem otoriter menuju kehidupan demokrasi dan belum diimbangi oleh pengaktifan sistem politik untuk menghasilkan kebijakan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut (Ardial, 2010: 23).

Berbicara mengenai kondisi politik pasca orde baru, nampaknya sistem pemerintahan yang ada dalam masa reformasi seperti saat ini masih memunculkan sejumlah masalah atau konflik dalam perpolitikan Indonesia. Dalam politik juga erat kaitannya dengan komunikasi, begitu pun sebaliknya.

Soyomukti (2013: 1-2) mengatakan komunikasi politik adalah suatu gejala yang tak terhindarkan, bahkan semakin nyata. Contoh yang paling mudah dan jelas terlihat dari gejala komunikasi politik adalah adanya pertarungan antara berbagai kepentingan yang muncul dalam tindakan politik.

Pergantian momentum dari orde baru ke masa reformasi sebetulnya sudah muncul suatu perubahan yang lebih baik.

Budiardjo (2008: 134-135) mengatakan bahwa tumbanganya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman orde baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga

eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR). Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif. Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Budiardjo (2008: 483) juga mengatakan bahwa reformasi membawa beberapa perubahan fundamental. Pertama, dibuka kesempatan kembali untuk bergerakinya partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin dalam pemilihan umum 1999 yang diselenggarakan dengan disertai banyak partai.

Upaya pemberantasan korupsi di masa reformasi ini dimulai momentum dengan adanya kebebasan pers dan kebebasan politik umumnya. Dalam pelembagaannya dimulai dengan pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang mulai terjadi sedikit gereget dengan terungkapnya daftar kekayaan berbagai pejabat tinggi yang abnormal (Damanhuri, 2006: 8).

Namun, pada kenyataannya, penyakit politik seperti korupsi masih terus bergulir yang biasanya dilakukan oleh badan legislatif atau eksekutif terkait. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan, hal ini juga bisa dilakukan oleh siapa pun, tak terkecuali seperti menteri, pejabat, pengusaha, atau orang-orang golongan besar yang menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan suatu kelompok atau individu.

Syafiie (2011: 307-308) mengemukakan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan siapa juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Selain dari itu, korupsi diartikan pula sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah keuangan negara atau pun suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara (atau daerah) yang dengan mempergunakan kesempatan (kewenangan/ kekuasaan) yang diberikan padanya oleh jabatan (langsung/ tidak langsung) membawa keuntungan material baginya.

Ironi politik bangsa telah membentangkan ruang politik yang mempertontonkan berbagai sikap, tingkah laku, cara bicara, bahasa, dan simbol-simbol yang bersifat ironis. Kontradiksi antara kata dengan perbuatan, inkonsistensi antara ideologi dan gaya hidup, dualisme antara tindakan dan ucapan, dan pertentangan antara etika (politik) dan tindakan (politik)-*politikus ironia*. Absurditas politik bangsa telah memaparkan sebuah ruang absurditas politik yang di dalamnya tercipta berbagai kehampaan makna politik, ketiadaan nilai politik, ketidakpastian

tujuan politik, pengaburan komunikasi politik, dan pendangkalan ideologi politik serta degradasi moralitas politik-*politicus absurditas* (Piliang, 2003: 51-52).

Meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilaksanakan, kondisi tidak kunjung membaik. Sejarah mencatat begitu banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka. Tetapi paradoks terjadi, terlepas apakah mereka benar-benar antikorupsi dan pada awalnya berupaya keras untuk memberantas korupsi, ataukah mereka sekadar menggunakan isu korupsi untuk meraih simpati massa saja, banyak di antara mereka yang jatuh akibat kasus korupsi. Di Indonesia misalnya, pada awal kepemimpinan, Presiden Soeharto berupaya secara serius memberantas korupsi melalui pembentukan berbagai lembaga, tetapi upaya yang bersifat formalistis tersebut gagal dan bahkan isu korupsi ikut menjatuhkannya pada 1998 (Zachrie dan Wijayanto, 2010: 21).

Tak hanya dari kalangan pemerintahan, ada salah satu pejabat yang juga tersandung kasus korupsi. Artalyta Suryani adalah mantan Komisaris Bank Dagang Nasional Indonesia, yang juga merupakan orang kepercayaan dari Sjamsul Nursalim. Artalyta menjadi tersangka korupsi dalam kasus percobaan penyuapan kepada Jaksa Urip Tri Gunawan guna memuluskan kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia dengan tersangka Sjamsul Nursalim (Setyawati, 2008: 96).

Sejak Orba hingga pasca-Orba, Indonesia menurut berbagai lembaga pemeringkat internasional, baik di Asia maupun di dunia sejak awal tahun 1990-an

hingga sekarang selalu masuk kategori negara terkorup. Dengan demikian, gejala korupsi ini seperti belum terbesit harapan untuk pemberantasannya (Damanhuri, 2006: 9).



2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang berjudul “Representasi Ironi Kondisi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru” Dalam Lirik Lagu Manusia Setengah Dewa Karya Iwan Fals” didapatkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

